



## Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya Di Aceh Dalam Perspektif Etika Dan Moral

Ahda Ilma, Intan Wulandari, Muhammad Ridha Razan

Universitas Indonesia

---

### Abstract

Received: 08 Juli 2024  
Revised: 13 Juli 2024  
Accepted: 21 Juli 2024

Artikel ini membahas tentang penolakan warga Aceh terhadap kedatangan pengungsi Rohingya. Penolakan ini dipahami dari perubahan moral yang terjadi di masyarakat Aceh, yang awalnya menerima pengungsi Rohingya atas dasar kemanusiaan, tetapi kemudian berubah karena sejumlah alasan. Alasan-alasan tersebut meliputi perilaku beberapa pengungsi yang tidak menghormati budaya dan aturan lokal, serta dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh peningkatan jumlah pengungsi. Selain itu, artikel ini juga menyoroti bahwa Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban hukum untuk menerima pengungsi. Situasi politik Myanmar yang tidak stabil juga menjadi hambatan dalam pemulangan pengungsi ke negara asalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data melalui media sosial, media massa, dan jurnal ilmiah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu ini.

**Keywords:** Rohingya, Pengungsi, Aceh, Etika, Moral

(\*) Corresponding Author: [ahda.ilm@ui.ac.id](mailto:ahda.ilm@ui.ac.id), [intanwlr@gmail.com](mailto:intanwlr@gmail.com), [ridha.razan000@gmail.com](mailto:ridha.razan000@gmail.com)

**How to Cite:** Ilma, A., Wulandari, I., & Razan, M. (2024). Penolakan Kedatangan Gelombang Pengungsi Rohingya Di Aceh Dalam Perspektif Etika Dan Moral. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(14), 53-60. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13342961>

---

### PENDAHULUAN

Rohingya adalah salah satu etnis minoritas beragama Islam yang berasal dari Rakhine, Myanmar. Etnis Rohingya menjadi korban pelanggaran HAM di Myanmar, yang dapat disebut sebagai *slow burning genocide*, yang berlangsung sejak 1962 di era rezim Ne Win hingga saat ini (Zarni dan Cowley, 2014). Rasisme anti Rohingya yang tumbuh di Myanmar menjadi dasar dari kasus pelanggaran HAM terhadap Rohingya, yang merupakan etnis muslim minoritas yang mendiami daerah Rakhine, Myanmar. Gerakan rasisme anti Rohingya ini dipicu oleh anggapan bahwa Rohingya merupakan imigran ilegal yang datang dari Bengali ke Myanmar saat Inggris berkuasa. Pada masa pendudukannya di Myanmar, Inggris merekrut pekerja yang berasal dari Chitagong untuk menjadi petani diakibatkan kelangkaan pekerja di bidang agrikultural saat itu. Petani tersebut pada awalnya akan pulang kembali ke negara asalnya saat musim panen selesai. Namun, seiring berjalannya waktu, petani musiman tersebut mulai menetap di daerah Myanmar, tepatnya di Rakhine (Zan dan Chan, 2005).

Rasisme dan pelanggaran HAM yang dialami oleh Rohingya adalah represi yang didukung penuh oleh pemerintahan Myanmar, ditilik dari kebijakan yang diputuskan. Usaha pencabutan hak kewarganegaraan Rohingya secara besar-besaran diawali dengan Operasi Nagamin tahun 1978. Melalui operasi tersebut, pemerintahan yang berwenang mencabut tanda kewarganegaraan atau *National Registration Card* (NRC) milik etnis Rohingya, yang kemudian memicu kekerasan

berskala besar dan pengungsian ke Bangladesh. Namun, karena kesepakatan kedua belah negara, dilakukan proses repatriasi Rohingya ke Myanmar yang memicu operasi selanjutnya, yaitu *The Citizenship Act 1982*. Agenda operasi kali ini adalah dengan mengeluarkan Rohingya dari etnis resmi yang terdaftar di Myanmar. Akibatnya, hak kewarganegaraan Rohingya menjadi terbatas (Zarni dan Cowley, 2014).

Hingga tahun-tahun berikutnya, Rohingya masih terus menjadi korban rasisme di Myanmar yang diwarnai dengan kekerasan yang melanggar jelas melanggar HAM. Karena masalah tersebut tak kunjung selesai, dilansir dari laman milik USA for UNHCR (2023), etnis Rohingya mulai mengungsi kembali ke Bangladesh pada bulan Agustus tahun 2017 dan kemudian tinggal di kamp pengungsian Cox's Bazar. Selain mengungsi ke Bangladesh, etnis Rohingya juga mencari suaka ke beberapa negara lain seperti Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Kehidupan di kamp pengungsian Bangladesh juga sebetulnya tidak jauh lebih baik. Berdasarkan data yang dihimpun Wei dan Carr dalam Reuters Graphics (2017), menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di kamp tergolong tinggi, kurangnya sanitasi, serta akses terhadap fasilitas kesehatan yang masih terbatas menjadikan kamp pengungsian tersebut kurang layak huni. Situasi tidak layak dan alasan keamanan yang kian memburuk di kamp pengungsian Cox's Bazar kemudian menimbulkan rasa putus asa pengungsi Rohingya yang kemudian memicu mereka untuk pergi dari Bangladesh, dengan Indonesia sebagai salah satu negara tujuan mereka untuk berlabuh (Widadio dan Samosir, 2023. Dikutip dari BBC News Indonesia).

Menurut UNHCR Indonesia, Aceh telah kedatangan gelombang pengungsi Rohingya selama tiga kali di bulan November. Pada 14 November 2023, sekitar 200 imigran Rohingya tiba di pantai Gampong Blang Raya, Muara Tiga, Pidie, dengan enam diantaranya melarikan diri. Hari berikutnya, 147 imigran Rohingya lainnya mendarat di pantai Beurandeh, Kecamatan Batee, Pidie. Terakhir, pada Kamis, 16 November 2023, kapal yang membawa imigran Rohingya muncul di pesisir Jangka di Bireuen dan Aceh Utara. Ketika berita tentang kedatangan mereka tersebar, banyak warga datang ke lokasi. Meskipun terdapat keengganan untuk menerima mereka, warga sempat memberi makanan dan pakaian bekas kepada pengungsi sebelum meminta mereka untuk kembali ke laut.

Pada tanggal 29 November 2023, MPAA (Mahasiswa Pemuda Peduli Aceh) menunjukkan protes mereka terhadap pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh. Para pengunjung rasa ini menyatakan bahwa masyarakat lokal di Aceh lebih membutuhkan bantuan alih-alih para pengungsi Rohingya yang terus menerus berdatangan dan tak jarang membuat onar. Mereka tidak setuju dengan sikap pemerintah yang tidak tegas menangani fenomena kedatangan gelombang pengungsi ini.

Masyarakat Aceh mempunyai beberapa alasan di balik sikap penolakan tersebut. Menurut Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto yang dikutip dari DW, alasan tersebut terutama karena tidak adanya fasilitas penampungan yang memadai dan ditemukannya perilaku tidak mengenakan dari pengungsi Rohingya sebelumnya, seperti melarikan diri, tidak menjaga kebersihan, serta tidak mengikuti syariat Islam dan adat setempat. Beberapa pengungsi dikabarkan telah membuang makanan dan bantuan yang diberikan ke laut. Kapolsek Jangka, Ipda Novizal,

menyatakan bahwa bahkan ada oknum pengungsi yang menolak makanan yang diberikan dan membuang beras dan mie instan ke laut.

Mengutip laporan dari CNN Indonesia, Muhadjir Effendy, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang diwawancarai pada tanggal 20 November, mengatakan bahwa penolakan Aceh merupakan sebuah 'letupan kecil'. Sebab, walaupun terdapat masyarakat Aceh yang terang-terangan menolak kedatangan pengungsi Rohingya, masih ada masyarakat lainnya yang mau menerima pengungsi-pengungsi tersebut dan bersedia membantu mereka. Selain itu, adanya lembaga kemanusiaan lokal dan UNHCR sebagai organisasi PBB yang menangani masalah pengungsi juga turut memberikan bantuan terhadap permasalahan ini.

Oleh karena itu, masyarakat Aceh juga sudah telah menyampaikan kekhawatiran akan semakin banyaknya gelombang pengungsi Rohingya ke pemerintah pusat. Presiden Indonesia, Joko Widodo pun telah memberikan perhatian ke dalam isu yang sedang naik di Aceh ini. Saat ini, pemerintah Aceh masih menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah pusat dan per hari Senin di tanggal 4 Desember 2023, Menko Polhukam Mahfud MD telah diberikan instruksi oleh presiden Indonesia untuk menangani permasalahan ini dan menginformasikan bahwa pengungsi Rohingya akan dipulangkan ke daerah asalnya. Menindaklanjuti permasalahan pengungsi Rohingya ini, akan segera dilaksanakan pertemuan dengan UNHCR untuk mendiskusikan masalah ini.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan suatu aktivitas yang terencana, terstruktur, sistematis, dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. (Semiawan, 2010). Aktivitas tersebut dapat dikatakan sebagai aktivitas ilmiah karena adanya aspek ilmu pengetahuan, aspek-aspek yang ada pada aktivitas tersebut adalah objektif, kritis, sistematis, dan berdasarkan data.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif sendiri digunakan karena tujuan dari penelitian, yaitu eksplorasi dan pemahaman terhadap suatu konsep secara lebih detail. Pada prosesnya dilakukan pengumpulan informasi melalui media sosial, media massa, dan jurnal-jurnal ilmiah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Moral berasal dari *moralis* yang merupakan kata dalam bahasa latin. *Moralis* sendiri memiliki arti tradisi atau perilaku yang benar. Sehingga secara arti bahasa, moral merupakan sesuatu yang mendefinisikan benar atau salah. Sesuai dengan arti dari *moralis*, yaitu tradisi, yang mana arti tersebut menandakan bahwa sekelompok orang harus menerima definisi benar salah atas sesuatu, sehingga barulah definisi tersebut dapat dikatakan sebagai moral.

Dasar dari moral adalah diterimanya definisi benar dan salah dari suatu kelompok, maka merupakan keniscayaan bahwa moral akan terpengaruhi oleh perubahan dari kelompok penerima definisi benar atau salah. Perubahan tersebut didorong oleh berjalannya waktu yang menandakan adanya perubahan generasi yang mengikuti budaya yang dapat berbeda dari pendahulunya. Perbedaan budaya

yang dianut antara pendahulu dan penerus disebabkan oleh keadaan hidup yang dijalankan oleh setiap generasi kelompok.

Etika berasal dari bahasa Yunani, *ethos*, yang artinya adalah karakter moral seseorang. Jadi, secara arti bahasa, maka etika merupakan definisi baik atau buruk seseorang.

Perbedaan yang paling mendasar antara moral dan etika adalah sifatnya terhadap perubahan. Berdasarkan Dutelle & Taylor (2017) etika tidak akan berubah sementara itu moral dapat berubah. Biasanya akan terbesit pertanyaan mengapa etika yang memiliki arti karakteristik moral—yang mana moral dapat berubah, dapat tidak berubah. Dalam hal ini, etika dinyatakan tidak dapat berubah karena etika dianggap menjadi dasar dari perilaku profesional, seperti kejujuran dan integritas tetapi aplikasi dari nilai-nilai tersebut ada di luar kerangka etika karena dipengaruhi oleh moral yang berlaku di masyarakat.

Sejak tahun 2009, Indonesia telah menjadi tempat persinggahan pengungsi Rohingya dari Myanmar. Sejak kedatangan tersebut, masyarakat Aceh memperlakukan pengungsi Rohingya dan menerima mereka atas dasar kemanusiaan dengan membantu memberikan tempat tinggal, kebutuhan pangan, serta akses pelayanan kesehatan ke para pengungsi Rohingya. Akan tetapi, per November 2023 ini, Aceh telah menampung lebih dari 1.000 orang pengungsi Rohingya. Dengan semakin banyaknya pertambahan angka pengungsi Rohingya setiap tahun, Aceh sebagai provinsi terdepan yang menjadi lokasi pengungsian Rohingya, yang tadinya menerima dan menolong pengungsi-pengungsi ini, justru malah menolak kedatangan gelombang pengungsi Rohingya sekarang.

Fenomena penolakan masyarakat Aceh terhadap kedatangan pengungsi Rohingya dapat dilihat berdasarkan teori moral dan etika, bahwa telah terjadi perubahan moral pada masyarakat Aceh. Perubahan moral ini terjadi karena masyarakat Aceh yang pada awalnya menerima para pengungsi Rohingya dengan tangan terbuka karena didasarkan oleh semangat satu iman dan penyamaan penderitaan masyarakat Rohingnya dengan penderitaan masyarakat Palestina yang dianggap memiliki kesamaan dalam represi oleh pihak ketiga yang disuarakan sebagai perbedaan agama.

Namun, penolakan masyarakat Aceh bukanlah tanpa alasan. Masyarakat Aceh melakukan penolakan terhadap imigran pengungsi Rohingya setelah mereka merasakan banyaknya dampak negatif yang ditimbulkan oleh imigran pengungsi Rohingya. Beberapa dampak negatif tidak mengenakkan yang dirasakan oleh masyarakat Aceh adalah karena adanya beberapa pengungsi Rohingya yang tidak mematuhi aturan budaya yang berlaku di Aceh sehingga mereka dianggap tidak menghargai budaya Aceh dan mengganggu keselarasan kehidupan masyarakat Aceh. Selain itu, terjadi kasus pelanggaran hukum, mulai dari pencurian produk-produk perkebunan, pelecehan seksual, hingga pemerkosaan terhadap anak-anak yang dilakukan oleh pengungsi Rohingya kepada masyarakat Aceh.

Selain penolakan yang disebabkan oleh perilaku beberapa pengungsi Rohingya, ada beberapa penyebab internal lain. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) mengenai keadaan ekonomi masyarakat Aceh pada Maret 2023, sebanyak 806,75 ribu jiwa warga aceh berada pada kategori miskin. Meskipun angka tersebut mengalami penurunan sebesar 1.43% jika dibandingkan dengan angka pada data di bulan September 2022 yang mencatat sebanyak 818,47 ribu jiwa. Banyaknya angka

masyarakat ke kategori miskin turut menjadikan Aceh sebagai salah satu peringkat atas provinsi termiskin di Indonesia. Oleh sebab itu, akan sangat sulit bagi pemerintah daerah maupun penduduk setempat bersedia menyokong kehidupan para pengungsi Rohingya. Meskipun para pengungsi Rohingya dapat disokong oleh dana yang dikeluarkan pemerintah pusat, bisa saja muncul pertanyaan dari penduduk setempat yang merasa dinomorduakan oleh pemerintah negara sendiri yang terlihat mengistimewakan para imigran pengungsi negara lain dibandingkan dengan rakyat asli Indonesia. Hal ini kemudian dapat mendorong ketidakpuasan terhadap pemerintah pusat yang sering diasosiasikan terhadap negara. Mengingat masa lalu provinsi Aceh yang pernah menjadi daerah yang sarat akan separatisme, maka terdapat peluang yang besar akan bangkitnya separatisme karena aksi pemerintah pusat yang membantu para imigran ilegal.

Tak hanya itu, Indonesia, sebagai negara yang memiliki kontrol atas provinsi Aceh, tidak meratifikasi Konvensi tahun 1951 dan Protokol 1967 tentang pengungsi. Berdasarkan ini, Indonesia tidak memiliki kewajiban untuk menerima para imigran pengungsi Rohingya. Indonesia hanya memiliki tanggung jawab sebagai negara sementara sebelum para imigran pengungsi Rohingya akan dikirimkan oleh UNHCR ke negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967. Akan tetapi, UNHCR seperti tidak berdaya untuk memindahkan para Rohingnya keluar dari Indonesia. Hal tersebut sebenarnya juga disebabkan karena sumber daya negara-negara maju yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 telah ditempati oleh imigran pengungsi dari Eropa Barat dan Amerika Serikat sehingga mereka tidak mau menerima imigran pengungsi tambahan.

Di lain sisi, pengembalian masyarakat Rohingnya ke Myanmar juga mengalami jalan buntu dikarenakan pengambilalihan kekuasaan dari tangan pemerintahan National League of Democracy yang ada di bawah kepemimpinan Aung San Suu Kyi oleh pihak militer Junta. Dengan diambilnya kekuasaan dari pihak Suu Kyi yang dapat dikaitkan dekat dengan Amerika Serikat, maka tentunya negara-negara seperti Rusia akan memberikan dukungan terhadap pemerintahan Junta. Hal ini seperti pernyataan dari menteri luar negeri Russia yang tidak mengutuk pengambilalihan kekuasaan yang dilakukan oleh Junta dan pernyataan dari Alexander Fomin yang merupakan Wakil Menteri Pertahanan Rusia pada kunjungannya ke Myanmar dalam rangka memperingati hari angkatan bersenjata Myanmar pada Maret 2021, menyatakan bahwa “Myanmar merupakan sekutu dan mitra strategis dari Federasi Rusia di Asia Tenggara dan kawasan Asia-Pasifik”. Oleh karena itu, dukungan Rusia dapat memperlambat pengembalian masyarakat Rohingnya karena peranan dan pengaruh negara tersebut pada PBB.

Permasalahan mengenai etnis Rohingnya yang mencari tempat perlindungan ke Aceh ini memang menjadi semakin besar dan menarik banyak perhatian warga Indonesia hingga menimbulkan banyak pro, kontra, juga dilema dari berbagai pihak. Kondisi pengungsi Rohingnya yang saat ini tidak memiliki kewarganegaraan dapat menjadi kemungkinan alasan bahwa mereka murni hanya ingin mendapat status kewarganegaraan dan diakui sebagai warga sebuah negara. Mempertimbangkan hal ini, Muhadjir Effendy menyatakan rencana untuk menyelenggarakan uji tes kelayakan kewarganegaraan ke para pengungsi Rohingnya agar dapat memastikan mereka yang singgah ke Indonesia benar-benar pengungsi

dan apakah mereka layak tinggal di Indonesia sebagai warga negara atau dipulangkan ke tempat asalnya.

## **KESIMPULAN**

Penolakan warga Aceh dapat dimengerti akibat adanya perubahan moral yang disebabkan beberapa hal, seperti ketidakpercayaan warga Aceh terhadap Rohingya yang sempat merugikan dan melakukan pelanggaran etika dan moral sebelum tahun 2023 di Aceh, saat Aceh masih menerima pengungsi Rohingya yang mencari suaka dan perlindungan dengan alasan kemanusiaan. Selain itu, keterbatasan ekonomi di Aceh juga menjadi alasan reaksi penolakan yang dikeluarkan oleh warga Aceh menjadi wajar. Akibat keterbatasan tersebut, belum tentu pengungsi Rohingya yang datang ke Aceh tahun ini mampu mendapatkan kehidupan yang lebih baik dibanding dengan di kamp pengungsian Cox's Bazar, Bangladesh. Dasar penolakan lainnya adalah karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Maka, Indonesia berhak menolak kedatangan pengungsi karena tidak ada komitmen tertentu dari Indonesia untuk menerima pengungsi.

Pengembalian Rohingya ke negara asalnya pun belum memungkinkan untuk dilakukan akibat atmosfer politik saat ini di Myanmar. Pemandangan pengungsi ke negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967 juga masih memiliki tantangan tersendiri yang dialami oleh masing-masing negara tersebut. Meskipun ada banyak pertimbangan yang membuat Rohingya belum bisa mendapatkan kepastian untuk menetap di suatu negara, hal ini tidak berarti bahwa reaksi penolakan dari masyarakat Aceh sepenuhnya salah jika ditinjau dari perspektif etika dan moral. UNHCR sebagai organisasi yang paling bertanggung jawab terhadap perlindungan dan penanganan pengungsi, harus segera mengambil keputusan yang bersifat global dan berkoordinasi dengan negara-negara di dunia untuk mencari resolusi terbaik dari permasalahan yang dialami oleh etnis Rohingya ini. Bagaimanapun, represi yang diterima oleh etnis Rohingya di Myanmar adalah bentuk dari pelanggaran HAM dan tidak dapat dibenarkan dari segala sisi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*14 Fakta Mengenai Pengungsi Rohingya – UNHCR Indonesia*. (2023, December 6). UNHCR. Retrieved December 6, 2023, from <https://www.unhcr.org/id/54329-14-fakta-mengenai-pengungsi-rohingya.html>

√. (2023, June 16). YouTube. Retrieved December 6, 2023, from <https://digitalcommons.law.uw.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1646&context=wilj>

*Alasan Pengungsi Rohingnya Ditolak Warga Aceh | Narasi TV*. (2023, November 30). Narasi Tv. Retrieved December 6, 2023, from <https://narasi.tv/read/narasi-daily/alasan-pengungsi-rohingnya-ditolak-warga-aceh>  
*Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh*. (n.d.). Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. Retrieved December 6, 2023, from <https://aceh.bps.go.id/indicator/23/41/1/jumlah-penduduk-miskin.html>

Cai, W., & Scarr, S. (2017, December 4). Life in the camps. Retrieved December 6, 2023, from <https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/MYANMAR-ROHINGYA/010051VB46G/index.html>

Cai, W., & Scarr, S. (2017, December 4). *The Rohingya Crisis: Life in The Camps*. Reuters Graphics. Retrieved Desember 6, 2023, from <https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/rngs/MYANMAR-ROHINGYA/010051VB46G/index.html>

*Cox's Bazar: A displaced people longing for a sense of home*. (2023, June 12). United Nations Population Fund. Retrieved Desember 6, 2023, from <https://www.unfpa.org/coxs-bazar-bangladesh-rohingya-refugee-crisis>

*Cox's Bazar: A displaced people longing for a sense of home*. (2023, June 12). United Nations Population Fund. Retrieved Desember 6, 2023, from <https://www.unfpa.org/coxs-bazar-bangladesh-rohingya-refugee-crisis>

Dutelle, A. W., & Taylor, R. S. (2017). *Ethics for the Public Service Professional*, second edition. Taylor & Francis.

*Influx Viruses The Illegal Muslims in Arakan*. (n.d.). Burma Library. Retrieved Desember 6, 2023, from [https://www.burmalibrary.org/docs21/Aye-Chan-2015-08-Influx\\_Viruses-The\\_Illegal\\_Muslims\\_in\\_Arakan-en-red.pdf](https://www.burmalibrary.org/docs21/Aye-Chan-2015-08-Influx_Viruses-The_Illegal_Muslims_in_Arakan-en-red.pdf)

Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabkota Di Aceh (Ribu Jiwa), 2021-2023. Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh . (n.d.).

Khairani, Fathiyah dan Tulus Yuniasih. *Peran UNHCR dalam Melindungi Pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2016-2020*. Jakarta: Universitas Budi Luhur. 2021.

*Muhadjir Sebut Warga Aceh Tolak Imigran Rohingya Hanya Letupan Kecil*. (2023, November 20). CNN Indonesia. Retrieved Desember 6, 2023, from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20231120131218-20-1026559/muhadjir-sebut-warga-aceh-tolak-imigran-rohingya-hanya-letupan-kecil>

*Rohingya Refugee Crisis Explained*. (2023, August 23). USA for UNHCR. Retrieved Desember 6, 2023, from <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>

*Rohingya Refugee Crisis Explained*. (2023, August 23). USA for UNHCR. Retrieved Desember 6, 2023, from <https://www.unrefugees.org/news/rohingya-refugee-crisis-explained/>

Semiawan, C. R. (n.d.). *Metode Penelitian Kualitatif* . Grasindo.

Thontowi, J. (2013, January). *Perlakuan Pemerintah Myanmar terhadap Minoritas Muslim Rohingya Perspektif Sejarah dan Hukum Internasional*. *Pandecta*, 8, 46-50. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v8i1.2359>

*Warga Aceh Gelar Aksi Demo Tolak Pengungsi Rohingya, Sebut Masyarakat Lokal Lebih Butuh Bantuan Pemerintah Halaman all - Kompas.com*. (2023, November 29). Regional - KOMPAS.com. Retrieved Desember 6, 2023, from <https://regional.kompas.com/read/2023/11/30/063000578/warga-aceh-gelar-aksi-demo-tolak-pengungsi-rohingya-sebut-masyarakat-lokal?page=all>

Widadio, N. A., & Samosir, H. (2023, November 23). *Rohingya: Gelombang pengungsi di Aceh karena situasi Cox's Bazar memburuk, 'Para penyelundup mengatur rute perjalanan untuk mendarat di Indonesia'*. BBC News Indonesia. Retrieved Desember 6, 2023, from <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c212p0j40xyo>

Zan, U. S., & Chan, A. (2005). *Influx Viruses The Illegal Muslims in Arakan*. Arakanese in United States, Planetarium Station, NYC.

Zarni, M., & Cowley, A. (2014). The Slow-Burning Genocide of Myanmar's Rohingya. *Pacific Rim Law & Policy Journal Association*, Volume 23(Number 3).  
Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел переговоры с председателем Государственного административного совета, главнокомандующим ВС Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном. Министерство обороны Российской Федерации (Russian Federation Ministry of Defense). (2021, March 26). <https://archive.is/234fS#selection-353.0-353.41>